

# **BAB I**

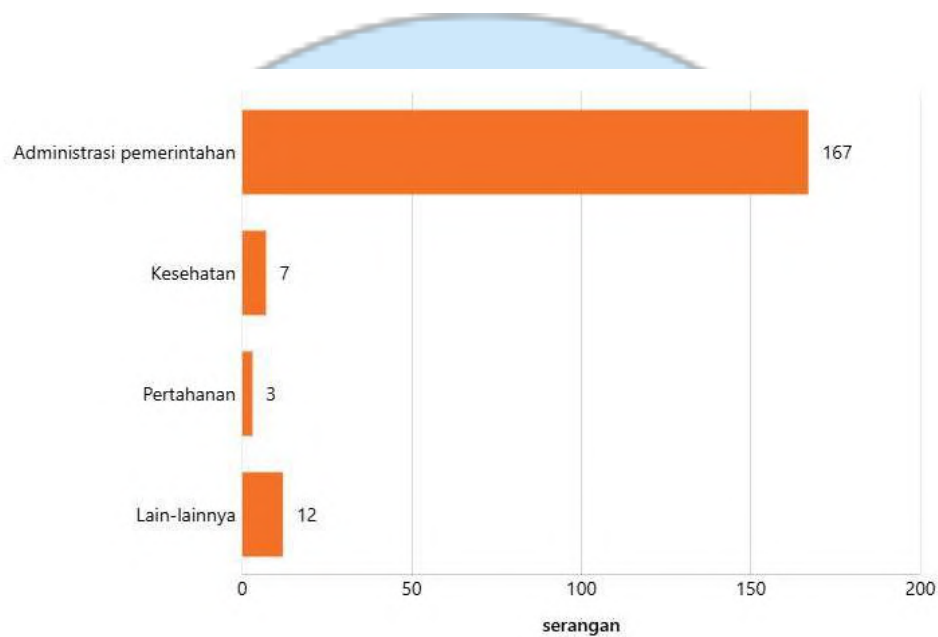
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi komunikasi terjadi begitu pesat saat ini, penyebaran informasi publik telah menjadi aspek yang tidak hanya penting, tetapi juga krusial dalam menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Transformasi digital yang terus berlangsung membawa perubahan besar dalam cara informasi disampaikan, diterima, dan dikelola. Terlebih dalam konteks instansi pemerintahan, peran komunikasi publik menjadi semakin vital karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pesan yang disampaikan haruslah baik dan saluran media komunikasi yang digunakan pun harus tepat agar komunikasi dapat berjalan lancar, sebab hal itu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik

Keterbukaan informasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang melekat pada prinsip *good governance*. *Good Governance* merujuk pada sebuah konsep pemerintah yang membangun serta menetapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan serta dapat diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat. Pemerintah dituntut untuk menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses secara bebas kapanpun dimanapun. Dalam lanskap komunikasi modern yang ditandai dengan kehadiran media sosial, platform digital, serta ekosistem *media online* yang dinamis, kecepatan distribusi berita menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam menyampaikan pesan-pesan publik.

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA



Gambar 1.1 Data jumlah serangan situs administrasi pemerintah

(Sumber: Databoks.com, 2023)

Namun demikian, dalam pengimplementasiannya, tentu terdapat berbagai tantangan yang menghambat kelancaran proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat satu isu utama yang dihadapi adalah keamanan digital. Berdasarkan data dari Databoks (2023), tercatat sebanyak 167 kasus *Web Defacement* atau peretasan situs yang menargetkan sektor administrasi pemerintah. Serangan semacam ini tidak hanya mengganggu akses terhadap informasi publik, tetapi juga dapat merusak kredibilitas serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Para pelaku *Web Defacement* kerap melancarkan aksinya dengan tujuan simbolis, seperti menyampaikan pesan kritik sosial atau hanya untuk merusak reputasi targetnya.



Gambar 1.2 Berita serangan ke Kominfo

(Sumber: DW News.com)

Mengutip dari *DW News.com* pada 6 September 2022, publik sempat dikejutkan oleh aksi peretasan yang dilakukan oleh sebuah akun anonim bernama Hacker Bjorka. Diketahui bahwa Hacker Bjorka meretas situs *website* resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang sejak tahun 2024 telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Aksi peretasan tersebut dilakukan dengan mengubah foto profil pada situs *web* dan menyebabkan situs Kominfo mengalami gangguan. Selain itu, Hacker Bjorka juga mengunggah sebuah pesan di platform BeachForums dengan judul "*My Message to Indonesian Government*" (Pesan Saya untuk Pemerintah Indonesia). Dalam isi pesan tersebut, ia menyatakan, "*My Message to Indonesian Government: Stop being an idiot*" (Pesan Saya untuk Pemerintah Indonesia: Berhentilah menjadi orang bodoh). Melalui aksi peretasan ini, Indonesia menjadi sorotan nasional terkait sistem keamanan digitalnya. Insiden ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi harus dilaksanakan untuk membangun kepercayaan publik terhadap data pemerintah yang jelas dan transparan, guna mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab.

Selain meretas situs web milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah melalui platform daring, Hacker Bjorka juga melakukan aksi dengan membocorkan sekitar enam juta

data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sebuah akun di situs *dark web*. Pada Juni 2022, ia merilis sekitar 70.904.989 data pengguna media sosial berbasis literatur, *Wattpad*, yang menjadi salah satu kasus kebocoran data terbesar pada platform tersebut. Dalam aksi lainnya, Hacker Bjorkan juga berhasil mengakses 26 juta data pelanggan IndiHome, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat IP, hingga riwayat situs yang dikunjungi pengguna. Tak berhenti di situ, Hacker Bjorka mengklaim bahwa ia memiliki 1,3 miliar data registrasi kartu SIM, yang mencakup NIK, nomor telepon, operator seluler yang digunakan, serta tanggal registrasi, dengan total ukuran data mencapai 87 GB. Pakar keamanan siber dan forensik digital dari *Vaksincom*, Alfons Tanujaya, mengungkapkan bahwa kebocoran-kebocoran tersebut memiliki dampak serius terhadap privasi dan keamanan digital masyarakat. Aksi kelima yang dilakukan Bjorka bahkan menyentuh ranah kerahasiaan negara, yakni dengan membocorkan dokumen rahasia untuk Presiden Joko Widodo pada periode 2019–2021, termasuk beberapa surat dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam konteks ini, Kementerian Sekretariat Negara memiliki peran strategis dan dapat menjadi wadah utama yang valid bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi dan terpercaya terkait kegiatan pemerintahan, khususnya yang melibatkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu bagian dari elemen strategis pemerintahan, memiliki peranan penting untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang benar, dapat dipercaya, dan berasal dari sumber resmi. Dengan memanfaatkan saluran komunikasi resmi, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan literasi digital masyarakat, Kemensetneg berupaya dalam mengurangi kesempatan bagi penyebaran disinformasi. Tujuan dari usaha ini adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat, menjaga kestabilan sosial, serta melindungi integritas negara dari ancaman non-militer seperti perang informasi yang semakin rumit saat ini.



Gambar 1.3 Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

(Sumber: [siapp.setneg.go.id](http://siapp.setneg.go.id))

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara pada 22 Juli 2024, diketahui bahwa dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada bulan Januari hingga Juni 2024 secara online. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survei tersebut mencapai 3,66 dari skala 4,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pejabat Pemerintahan di Kemensetneg berada pada kategori yang sangat baik. Masyarakat menilai kualitas layanan yang diberikan bersifat prima, efektif, dan efisien, sehingga memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap institusi ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia memainkan peran sentral dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai pendukung utama tugas Presiden dan Wakil Presiden, kementerian ini, melalui Biro Hubungan Masyarakat—khususnya Divisi Peliputan dan Dokumentasi—bertanggung jawab dalam mendokumentasikan berbagai kegiatan kenegaraan serta menyebarkannya kepada publik dengan pendekatan yang sistematis dan strategis. Penyampaian informasi dilakukan secara

luas melalui berbagai kanal digital resmi seperti *Website*, YouTube, Instagram, Twitter/X, dan TikTok, sehingga menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif.

Tidak hanya sebatas dokumentasi visual, Divisi Peliputan dan Dokumentasi juga menyusun narasi yang mendukung citra positif pemerintah serta memperkuat komunikasi strategis antar lembaga dan masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa setiap informasi yang disampaikan bukan hanya rekaman peristiwa, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang dibentuk dengan cermat untuk membangun kepercayaan dan partisipasi publik.

Kegiatan magang yang penulis jalani di Biro Hubungan Masyarakat, khususnya pada Divisi Peliputan dan Dokumentasi, memberikan pengalaman langsung dalam memahami mekanisme kerja komunikasi publik di lingkungan pemerintahan. Terlibat secara aktif dalam proses produksi konten hingga penyebaran informasi, penulis mendapatkan wawasan berharga mengenai bagaimana strategi komunikasi tersebut diterapkan secara nyata. Oleh karena itu, laporan magang ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus sebagai refleksi atas pengalaman praktis yang memperkaya pemahaman penulis terhadap dinamika komunikasi pemerintahan di era digital.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kegiatan magang merupakan bagian dari kewajiban akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai bagian dari proses penyelesaian studi di Universitas Multimedia Nusantara. Selain menjadi bagian dari kurikulum, program magang juga dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat merasakan secara langsung suasana dan tantangan di dunia kerja. Melalui pengalaman ini, mahasiswa diharapkan dapat memperluas pemahaman mereka terhadap lingkungan profesional serta mengembangkan sikap positif seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan profesionalisme yang penting untuk karier di masa mendatang.

Melalui praktik kerja magang, adapun tujuan dari kerja magang yang dilakukan oleh penulis :

1. Mengetahui proses kerja divisi Peliputan dan Dokumentasi pada biro Hubungan Masyarakat di Kementerian Sekretariat Negara
2. Mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat dalam Mata Kuliah *Creative Media Production* dan *Social Media & Mobile Marketing Strategy* seperti keterampilan dalam mengambil foto, video, hingga pengeditan dalam membuat karya- karya kreatif yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas selama kegiatan kerja magang berlangsung.
3. Mengasah kemampuan *softskills* dan *hardskills* selama melaksanakan kerja magang pada divisi Peliputan dan Dokumentasi biro Hubungan Masyarakat di Kementerian Sekretariat Negara.

### **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

#### **1.3.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Magang**

Nama Tempat : Kementerian Sekretariat Negara

Alamat: Jl. Veteran No. 17 - 18, RT.2/ RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Link Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/uN3FF4Qhe9sa8jgr9>

No. telepon: (021) 3849065

Surel : [humas@setneg.go.id](mailto:humas@setneg.go.id)

[persuratan@setneg.go.id](mailto:persuratan@setneg.go.id)

#### **1.3.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Praktik kerja magang ini bertempat di Kementerian Sekretariat Negara pada biro Hubungan Masyarakat bagian Peliputan dan Dokumentasi.

1. Durasi: 6 bulan
2. Waktu: 2 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025
3. Jam Operasional: Senin - Kamis, pukul 08.00 - 16.00 WIB  
Jumat, pukul 08.00 - 16.30 WIB

#### **1.3.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Mengikuti pembekalan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UMN melalui platform zoom meeting.
- 2) Melakukan pengisian KRS untuk mata kuliah magang di laman [myumn.ac.id](http://myumn.ac.id), dengan syarat telah menyelesaikan minimal 110 SKS dan tidak memiliki nilai D maupun E. Selain itu, mahasiswa juga diminta mengajukan permintaan transkrip nilai dari semester awal hingga terakhir sebelum magang melalui situs [www.gapura.umn.ac.id](http://www.gapura.umn.ac.id).
- 3) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan KM-01 lebih dari satu kali melalui Google Form yang dikirim lewat email, guna memverifikasi tempat magang yang sesuai kriteria. Jika disetujui, mahasiswa akan menerima KM-02 (Surat Pengantar Magang) dari Kaprodi.
- 4) Setelah mendapatkan tempat magang yang cocok, mahasiswa dapat mengisi dan mengirimkan formulir KM-01 di situs [myumn.ac.id](http://myumn.ac.id).
- 5) Tahap selanjutnya adalah mengunduh formulir KM-03 (Kartu Kerja Magang), KM-04 (Absensi Kehadiran Magang), KM-05 (Laporan Realisasi Magang), KM-06 (Form Penilaian Magang), dan KM-07 (Verifikasi Laporan Magang), yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pembuatan laporan magang

#### B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang

- 1) Penulis melakukan registrasi akun di laman [olimpus.setneg.go.id](http://olimpus.setneg.go.id) pada tanggal 4 Desember 2024. Serta mengirimkan Portofolio, Curriculum Vitae dan berbagai dokumen yang diperlukan oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara.
- 2) Penulis dihubungi oleh pihak recruitment (HRD) dari Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 10 Desember 2024 melalui Whatsapp untuk mengirimkan kembali portofolio dan Curriculum Vitae.
- 3) Pihak Kementerian Sekretariat Negara mengirimkan penugasan secara online melalui WhatsApp.
- 4) Pada 11 Desember 2024, penulis mengirimkan hasil dari penugasan kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara.

- 5) Di hari yang sama, penulis melakukan interview dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara secara online melalui zoom.
- 6) Pada 18 Desember 2024, penulis mendapatkan e-mail dari pihak Kementerian Sekretariat Negara bahwa penulis dinyatakan lolos sebagai peserta praktik kerja pada Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat, pada Program Seleksi Magang Kementerian Sekretariat Negara.

#### C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

- 1) Penulis memulai kerja magang pada 2 Januari 2025 di Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dari divisi Publikasi dan Dokumentasi pada biro Hubungan Masyarakat.

#### D. Proses Pembuatan Laporan Praktek Kerja Magang

- 1) Pembuatan laporan praktek kerja magang dibimbing oleh Ibu Nike Yunandika S.I.Kom., M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing melalui pertemuan secara daring dan luring.

UMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA